

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk kredit atau pembiayaan yang diberikan untuk modal kerja maupun investasi kepada individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang memiliki tingkat produktivitas yang memadai, namun belum memiliki jaminan tambahan atau jika jaminan tambahan yang dimiliki masih kurang memadai. (PERMENKO RI, 2022) Kredit usaha rakyat diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1984, pada bank rakyat indonesia (BRI), sebagai usaha untuk menambah akses pembiayaan bagi sektor usaha super mikro, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit usaha rakyat yakni jenis pembiayaan yang didanai pemerintah untuk masyarakat pengusaha super mikro, mikro, kecil, atau menengah. Selama bertahun-tahun program ini terus dikembangkan dan diperluas oleh pemerintah, dengan beberapa perubahan dalam kriteria pemberian kredit dan jumlah dana yang disediakan

Program KUR Mikro Syariah diluncurkan sebagai upaya untuk mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia dan memberikan pilihan alternatif pembiayaan bagi usaha super mikro yang ingin mengambil pendekatan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Dan program pembiayaan KUR ini mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan akses pembiayaan untuk pelaku usaha super mikro dan umkm untuk membantu dalam pengembangan dan meningkatkan daya saing ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. KUR memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha yang akan dibiayai, seperti KUR super mikro, KUR usaha rakyat, KUR komersial dan lain sebagainya. Saat ini, KUR dapat diakses melalui berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan

pemerintah dan swasta, selain itu lembaga-lembaga nonkeuangan seperti Baitul Mal dan Pegadaian Syariah. (Kemenkeu, 2019)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan bentuk pembiayaan modal kerja atau investasi yang ditujukan kepada debitur individu, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, serta kelompok usaha yang memiliki tingkat produktivitas yang memadai namun belum memiliki agunan tambahan atau jika agunan tambahannya masih tidak mencukupi dan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, dan memiliki potensi untuk memberikan solusi finansial bagi pelaku usaha super mikro dan umkm. Tujuan dari KUR Syariah adalah untuk memperluas akses pembiayaan ke sektor produktif, meningkatkan daya saing usaha super mikro, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sumber dana KUR Syariah berasal dari pemerintah, lembaga keuangan syariah yang menjadi saluran distribusi KUR Syariah dan lembaga lainnya. (A Wahid Mongkito, T Wardy Putra, M Imran, K Novita, 2021)

Kredit usaha rakyat (KUR) super mikro merupakan suatu bentuk kredit yang bertujuan untuk mengembangkan pendapatan dalam sektor usaha super dan umkm dengan tujuan utama untuk memperluas dan memperbaiki akses ke sumber pembiayaan bagi usaha produktif, meningkatkan daya saing usaha super mikro, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.(Elliyana et al., 2020). Dalam program KUR Super Mikro, agunan utama adalah usaha atau proyek yang mendapatkan pembiayaan dari KUR, tanpa memerlukan jaminan tambahan, yaitu para penerima yang terdampak PHK dan para Ibu Rumah Tangga yang mengelola usaha memenuhi syarat untuk memperoleh KUR Super Mikro dengan ketentuan berikut: pertama, usaha harus tergolong dalam kategori usaha mikro; kedua, usaha calon penerima KUR Super Mikro dapat beroperasi selama minimal 6

bulan. Namun, jika kurang dari 6 bulan, ada beberapa persyaratan yang dapat dipenuhi seperti mengikuti program pendampingan (baik formal maupun informal), bergabung dalam kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang sudah memiliki usaha. Ketiga, untuk pegawai yang mengalami PHK, tidak diwajibkan untuk memiliki usaha selama minimal 3 bulan dengan pelatihan selama 3 bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan KUR. Namun, usaha dapat berjalan kurang dari 3 bulan atau bahkan usaha baru. Keempat, penerima belum pernah menerima KUR sebelumnya. (PERMENKO RI, 2022)

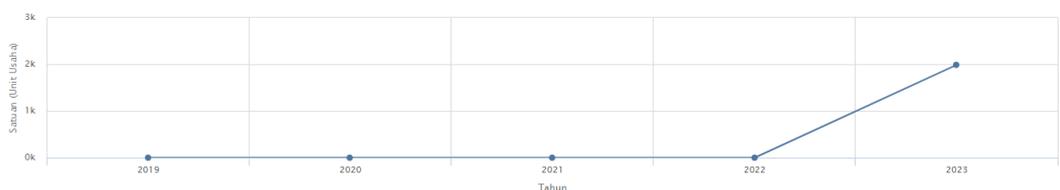
Banyak usaha super mikro dan usaha mikro, kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan karena terjadi penurunan permintaan serta adanya gangguan dalam rantai pasokan. Tantangan lainnya terletak pada akses keuangan, di mana sebagian UMKM menghadapi kesulitan dalam memperoleh sumber dana, terutama bagi yang belum memiliki sejarah kredit yang solid. Modal berperan sebagai faktor penunjang peningkatan kinerja dan produksi. Para pelaku usaha mikro yang terperangkap dalam kebutuhan akan modal sering kali mengambil langkah cepat dengan meminta bantuan modal kepada pihak pemberi pinjaman dengan bunga tinggi, rentenir atau pinjaman online (pinjol), yang pada akhirnya dapat mengikat mereka dalam lingkaran masalah finansial. Dengan tingkat bunga yang tinggi, terlebih jika pembayaran dilakukan dengan penundaan, mereka mungkin kesulitan untuk melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, sehingga hutang terus bertambah. Hal ini selanjutnya berdampak negatif pada hasil usaha mereka, menyebabkan penurunan produktivitas. Sehingga pemerintah penyalurkan program kur melalui Pegadaian Syariah.

Industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sebagian besar dari total lapangan kerja bagi 119,56 juta orang atau sebesar 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia (Kemenkeu, 2023) dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi instrumen kebijakan yang penting, memberikan akses keuangan kepada para pelaku UMKM untuk memperluas usaha mereka.

Namun, di samping KUR pada Lembaga keuangan konvensional, Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah telah mulai menjadi pilihan yang menarik bagi pengusaha mikro dan kecil. Pegadaian Syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis prinsip syariah, memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi pelaku usaha mikro. Dengan pendekatan yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, KUR syariah diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih inklusif bagi para pelaku usaha mikro.

Pada data diatas pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah umkm yang berkembang usaha yang sangat signifikan dengan total 1,988 (Kemenkeu, 2023) Di

Grafik Series Data DIY Tahun 2019 s/d 2023



kota

**Gambar 1. 1 Grafik Data Umkm yang berkembang Tahun 2019 s/d 2023**

Yogyakarta, potensi UMKM sangat besar dengan banyaknya usaha mikro yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Namun, masih ada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas implementasi KUR syariah oleh Pegadaian Syariah.

Pemilihan obyek di Pegadaian Syariah karena memiliki daya tarik yaitu kur syariah pada pegadaian syariah adalah program baru dari pemerintah yang disalurkan pada bulan Juli 2022, dan kebijakan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan mu'nah yang sangat terjangkau, 0,14% atau setara 3% per tahun. Ini merupakan angka yang signifikan lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank BSI, BRI, BNI, BCA, MANDIRI dan lain-lain, yang menawarkan KUR dengan suku bunga sekitar 6% per tahun.(Pegadaian, 2023) selain itu pegadaian syariah menawarkan pembiayaan kur syariah dengan berlandaskan prinsip syariah dengan persyaratan yang tergolong mudah. Terdapat perbedaan yang sangat menarik antara Pegadaian Syariah dengan Lembaga keuangan lain (Bsi, 2023), yaitu:

Pegadaian syariah adalah fasilitas pinjaman subsidi dari pemerintah sebesar 5,9



tabel 1. 1 Tabel KUR Pegadaian Syariah

triliun yang disalurkan dengan system syariah dan

menargetkan penyaluran kur tersebut dapat diakses di lebih dari 4.000 outlet seluruh indonesia pada bulan Juli 2022, dan aktif beroperasi aktif pada bulan Oktober 2022.

Pegadaian Syariah menawarkan satu bentuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu KUR Syariah super mikro, dengan batas maksimal pembiayaan sebesar 10 juta rupiah. Suku bunga KUR Syariah Pegadaian adalah 0,14% per bulan, setara dengan 3% per tahun, yang terbilang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Selain itu, proses pengajuan hingga pencairan KUR di Pegadaian Syariah tergolong mudah dan tidak terikat dengan periode masa berlaku seperti yang ditemui di lembaga perbankan syariah di Indonesia.(Pegadaian, 2023)



NO	PLAFOND	JANGKA WAKTU (BULAN)				
		12 (1 TAHUN)	24 (2 TAHUN)	36 (3 TAHUN)	48 (4 TAHUN)	60 (5 TAHUN)
1	Rp 5,000,000	Rp 430,300	Rp 221,400	Rp 151,800	Rp 117,000	Rp 96,100
2	Rp 10,000,000	Rp 860,500	Rp 442,800	Rp 303,500	Rp 233,900	Rp 192,100
3	Rp 20,000,000	Rp 1,721,000	Rp 885,500	Rp 607,000	Rp 467,700	Rp 384,200
4	Rp 30,000,000	Rp 2,851,500	Rp 1,328,200	Rp 910,500	Rp 701,600	Rp 576,300
5	Rp 40,000,000	Rp 3,442,000	Rp 1,770,900	Rp 1,214,000	Rp 935,400	Rp 768,400
6	Rp 50,000,000	Rp 4,302,500	Rp 2,213,600	Rp 1,517,500	Rp 1,169,300	Rp 960,400
7	Rp 60,000,000	Rp 5,162,900	Rp 2,656,300	Rp 1,821,000	Rp 1,403,100	Rp 1,152,500
8	Rp 70,000,000	Rp 6,023,600	Rp 3,099,000	Rp 2,124,500	Rp 1,637,000	Rp 1,344,600
9	Rp 80,000,000	Rp 6,883,900	Rp 3,541,700	Rp 2,428,000	Rp 1,870,800	Rp 1,536,700
10	Rp 90,000,000	Rp 7,744,400	Rp 3,984,400	Rp 2,731,500	Rp 2,104,600	Rp 1,728,700
11	Rp 100,000,000	Rp 8,604,900	Rp 4,427,200	Rp 3,035,000	Rp 2,338,500	Rp 1,920,800
12	Rp 110,000,000	Rp 9,465,300	Rp 4,869,900	Rp 3,338,500	Rp 2,572,300	Rp 2,112,900
13	Rp 120,000,000	Rp 10,325,600	Rp 5,312,500	Rp 3,642,000	Rp 2,806,200	Rp 2,305,000
14	Rp 130,000,000	Rp 11,186,300	Rp 5,755,300	Rp 3,945,500	Rp 3,040,000	Rp 2,497,000
15	Rp 140,000,000	Rp 12,046,800	Rp 6,198,000	Rp 4,249,000	Rp 3,273,900	Rp 2,689,100
16	Rp 150,000,000	Rp 12,907,300	Rp 6,640,700	Rp 4,552,500	Rp 3,507,700	Rp 2,881,200
17	Rp 160,000,000	Rp 13,767,700	Rp 7,083,400	Rp 4,856,000	Rp 3,741,500	Rp 3,073,300
18	Rp 170,000,000	Rp 14,628,200	Rp 7,526,100	Rp 5,159,500	Rp 3,975,400	Rp 3,265,300
19	Rp 180,000,000	Rp 15,488,700	Rp 7,968,500	Rp 5,463,000	Rp 4,209,200	Rp 3,457,400
20	Rp 190,000,000	Rp 16,349,200	Rp 8,411,600	Rp 5,766,500	Rp 4,443,100	Rp 3,649,500
21	Rp 200,000,000	Rp 17,209,700	Rp 8,854,400	Rp 6,069,900	Rp 4,676,900	Rp 3,841,600
22	Rp 250,000,000	Rp 21,512,100	Rp 11,067,800	Rp 7,587,400	Rp 5,846,100	Rp 4,801,900
23	Rp 300,000,000	Rp 25,814,500	Rp 13,281,400	Rp 9,104,900	Rp 7,015,300	Rp 5,762,300
24	Rp 500,000,000	Rp 43,024,100	Rp 22,135,600	Rp 15,174,800	Rp 11,692,200	Rp 9,602,800

tabel 1. 2 Tabel KUR di BSI

Di sektor perbankan Syariah di Indonesia, terdapat kecenderungan untuk menawarkan beragam jenis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jenis-jenis KUR ini meliputi KUR super mikro dengan kisaran plafon antara 1 hingga 10 juta rupiah, KUR mikro dengan plafon antara 10 hingga 100 juta rupiah, dan KUR kecil yang menawarkan plafon antara 100 hingga 500 juta rupiah. Proses pengajuan KUR di perbankan Syariah membutuhkan waktu yang relatif lama, berkisar antara 7 hingga 14 hari kerja karena melibatkan prosedur yang cukup rumit. Lebih lanjut, program KUR di Bank Syariah

Indonesia (BSI) memiliki masa berlaku mulai dari 6 April 2022 hingga 31 Agustus 2027. (Bsi, 2023)

Pada pegadaian syariah, jenis pengelolaan kredit usaha rakyat lebih di fokuskan pada Usaha Mikro dan kecil, dan pada lembaga keuangan Perbankan lebih banyak pilihan jenis pinjaman yakni BSI KUR super mikro untuk pembiayaan UMKM dengan plafond mencapai 10 juta, BSI KUR mikro untuk UMKM supaya dapat memadati kebutuhan modal kerja (*working capital*) dan invertase mencapai 50 juta dan BSI KUR yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi yang mencapai 500 juta. Prosedur pengajuan lebih mudah dan cepat dengan 5 hari kerja hingga 7 hari kerja dibandingkan KUR pada perbankan syariah indonesia mencapai 14 hari kerja. Karena, tidak memerlukan persyaratan yang kompleks dan tidak memerlukan waktu lama untuk disetujui. (Pegadaian, 2023)

<u>Pebedaan 2 lembaga</u>	<u>Lembaga Non-bank Syariah</u>	<u>Keuangan Pegadaian</u>	<u>Lembaga Perbankan Syariah (BSI)</u>
<u>Plafond Pinjaman</u>	Maks 10 juta		Maks 10 juta
<u>Jenis dan macam KUR</u>	1 Jenis KUR		Memiliki beberapa jenis dan macam pinjaman KUR
<u>Margin</u>	0,14% perbulan setara dengan 3% pertahun		6 % pertahun
<u>Prosedur pengajuan</u>	3-7 hari Kerja		7-14 hari
<u>Periode masa berlaku KUR</u>	-		6 April 2022 s/d 31 Agustus 2027

**Gambar 1. 2 Perbedaan KUR Syariah pada Pegadaian Syariah dan BSI**

Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah, cabang Yogyakarta telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat usaha mikro di wilayah tersebut. Sejak peluncurannya pada bulan Juli tahun 2022, program ini telah berhasil menarik perhatian dan partisipasi aktif dari sejumlah nasabah usaha mikro. Berikut data jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Yogyakarta.

NO	Cabang dan Unit Pegadaian Syariah Yogyakarta	Jumlah Nasabah	Dana Yang Telah disalurkan
1	UPS Mertoyudan	23	Rp.210.000.000
2	Kantor CPS Kusumanegara	22	Rp.243.000.000
3	UPS Ngampilan	15	Rp.122.000.000
4	UPS Pasar Tello	29	Rp.268.000.000
5	UPS Bareng	32	Rp.273.000.000
6	UPS Bantengan	23	Rp.189.000.000
7	UPS Mlati	22	Rp.199.000.000
8	UPS Sari Harjo	26	Rp.239.000.000
9	UPS Terban	14	Rp.124.000.000
10	UPS Munggur	38	Rp.304.000.000
11	UPS Kebon Dalem	23	Rp.165.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	<b>Rp.2.336.000.000</b>

**Gambar 1. 4 Data Jumlah nasabah per Unit dan dana yang tersalurkan**

Berdasarkan tabel diatas, saat ini Pegadaian Syariah telah berhasil mendaftarkan sebanyak 267 nasabah cabang Yogyakarta, usaha mikro yang mengambil bagian dalam program KUR Syariah. Dengan antusiasme yang tinggi, para nasabah ini telah mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan total pembiayaan se-Yogyakarta telah mengalokasikan dana sebesar 2.336.000.000 rupiah yang telah berhasil disalurkan kepada nasabah-nasabah tersebut. Dana ini memberikan dukungan nyata bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan memberdayakan ekonomi lokal. Serta program KUR Mikro Syariah di Pegadaian

Syariah telah membuktikan dampak positifnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di Yogyakarta.

untuk memastikan keberhasilan program KUR Syariah dalam mendukung pengembangan Usaha Super Mikro, perlu dilakukan evaluasi mengenai efektivitas implementasi KUR di pegadaian syariah tersebut. Aspek yang digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi kredit usaha rakyat (KUR) tersebut dapat diukur menggunakan lima aspek, yaitu aspek ketepatan sasaran program, aspek ketepatan waktu penyaluran, aspek ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasabah, aspek ketepatan beban kredit dan aspek ketepatan prosedur (Najoan & Rares, 2022).

CPS	Target Exceed KUR (120%)	Realisasi 18 September 2023
UPS Kusumanegara	Rp 4.607.163.544,00	Rp 2.313.000.000,00

tabel 1. 3 Data target penyaluran KUR dan yang telah terealisasi

Pada

table data diatas, terdapat urgensi untuk mengukur efektivitas implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah oleh Pegadaian Syariah dalam mendukung sektor usaha super mikro. Data terkini menunjukkan bahwa target pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp. 4.607.163.544, namun realisasi pembiayaan yang tercapai hanya sebesar Rp. 2.313.000.000. Perbedaan signifikan antara target dan realisasi ini menandakan adanya potensi peningkatan implementasi program KUR syariah ini. Meskipun telah ada sejumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan akses dan dampak dari program ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam untuk menentukan sejauh mana efektivitas implementasi KUR syariah oleh Pegadaian Syariah dalam mendukung usaha super mikro. Dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah di Pegadaian Syariah. Dengan pertumbuhan ekonomi dan

perkembangan sektor usaha super mikro, implementasi KUR syariah di Pegadaian Syariah menjadi semakin penting. Analisis mendalam diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi ini dan mengidentifikasi potensi perbaikan guna memaksimalkan manfaat program ini bagi para pelaku usaha mikro. Selain itu penelitian ini didasari pada kebutuhan untuk mengeksplorasi dan memahami lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah, khususnya dalam mendukung usaha super mikro di wilayah Yogyakarta.

memahami efektivitas implementasi pembiayaan kur Pegadaian Syariah dapat menjadi solusi dukungan bagi masyarakat yang memerlukan dana usaha dan untuk mengetahui proses pengajuan dan pelaksanaan praktikum implementasi kur di pegadaian syariah. Selain itu, untuk mengetahui peran dan kendala- kendala saat praktik implementasi kur tersebut. Dengan latar belakang dan tujuan penelitian tersebut maka peneliti mengangkat judul EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DALAM Mendukung USAHA SUPER MIKRO (Studi kasus Pegadaian Syariah, di Yogyakarta)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana proses implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah untuk mendukung pengusaha Mikro?
2. Bagaimana efektivitas implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah pada Pegadaian Syariah dalam mendukung pengembangan Usaha Super Mikro di Yogyakarta?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berlandaskan uraian rumusan masalah maka tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini, yaitu:

1. Upaya tahu praktik pelaksanaan KUR mikro syariah pada pegadaian syariah studi kasus
2. Untuk mengetahui kendala serta hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan Usaha Mikro
3. Untuk mengetahui apakah KUR Syariah di Pegadaian Syariah telah efektif dalam mendukung pengembangan usaha super mikro

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian, diharap mampu memberikan banyak faedah dan pengetahuan yang luas serta mendalam mengenai efektivitas implementasi pembiayaan produk baru kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pegadaian syariah

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih mengoptimalkan efektivitas praktik pembiayaan kredit usaha rakyat untuk pengembangan usaha mikro.

- b. Bagi penulis

Dapat menjadikan pemahaman dan pengetahuan baru dalam bidang terkait efektivitas implementasi praktik pelaksanaan kredit usaha rakyat dalam pengembangan Usaha Mikro di Pegadaian syariah

c. Bagi pembaca

Memberikan dan mengenalkan produk baru kredit usaha rakyat pada Pegadaian syariah dan menjelaskan potensi kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan KUR dan Usaha Mikro di lingkungan Pegadaian Syariah.

3. Kegunaan Akademis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Serta dapat digunakan menjadi bahan rujukan oleh civitas akademika dimasa mendatang oleh peneliti selanjutnya untuk pengembangan atau penyempurnaan topik yang akan di angkat.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan pada penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN,** Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga dapat dipecahkan, memaparkan manfaat, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI,** Pada tahap ini berisikan uraian penjelasan penelitian terdahulu dan pemaparan tentang pengertian umum eefektivitas, Kredit usaha rakyat (KUR), Kredit usaha rakyat (KUR)Syariah, Kredit usaha rakyat (KUR) pada Pegadaian Syariah dan Usaha super mikro dan usaha mikro

**BAB III METODE PENELITIAN,** Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Bab ini meliputi jenis penelitian, teknik penentuan

sampel, teknik penentuan informan, teknisk pengumpulan data, dan jenis dan sumber data.

**BAB IV PEMBAHASAN,** Pada bab empat ini berisikan pembahasan yang menjawab rumusan masalah dan uraian tentang efektivitas implementasi kredit usaha rakyat (KUR) syariah pada pegadaian syariah dalam mendukung pengembangan usaha super mikro dengan Studi Kasus Pegadaian Syariah di Yogyakarta.

**BAB V KESIMPULAN,** Dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan tentang efektivitas implementasi kredit usaha rakyat (KUR) syariah pada pegadaian syariah dalam mendukung pengembangan usaha super mikro dengan Studi Kasus Pegadaian Syariah yang berlokasi di Yogyakarta. Disertai dengan pemberian saran-saran yang konstruktif sehubungan dengan masalah yang ditemui sebagai bahan pertimbangan Perusahaan dan peneliti lainnya untuk perbaikan lebih lanjut.